

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan seseorang karena melalui pendidikan seseorang dapat meningkatkan kecerdasan, keterampilan, mengembangkan potensi diri dan dapat membentuk pribadi yang bertanggung jawab, cerdas dan kreatif. Berkenaan hal tersebut sebetulnya dalam Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 1 telah disebutkan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.

Selanjutnya di pasal 4 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 juga menyatakan bahwa “pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, kerja keras, mandiri, estetis, berilmu, kreatif, produktif, mampu bersaing, cakap, demokratis, memiliki wawasan keunggulan, harmonis dengan lingkungan alam, memiliki tanggung jawab sosial, memiliki semangat kebangsaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Untuk mencapai tujuan pendidikan seperti yang diamanatkan oleh Undang undang

sistem Pendidikan Nasional tersebut, dapat melalui sarana pendidikan informal (keluarga), pendidikan non formal (pelatihan-pelatihan) dan pendidikan formal. Pendidikan secara formal dilakukan oleh sebuah lembaga yang disebut dengan sekolah. Sekolah dibangun sebagai wahana pendidikan formal dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan sikap dan nilai siswa yang mampu melahirkan nilai-nilai kehidupan secara pribadi di dalam menciptakan iklim budaya sekolah yang penuh makna. Sekolah mempunyai tanggung jawab untuk mendidik siswa secara berkisinambungan dan terus menerus.

Kenyataan dewasa ini, dunia pendidikan kita dikejutkan dengan berita-berita tentang berbagai perilaku tidak baik di kalangan sebagian para siswa di berbagai media massa. Perilaku tidak baik di kalangan siswa tersebut di antaranya adalah kekerasan sesama pelajar, memalak teman, berangkat ke sekolah tidak sampai di sekolah, seks bebas, minuman keras, berkeliaran pada jam-jam sekolah, kebut-kebutan di jalan raya, merokok di samping sekolah, tawuran antar sekolah, membolos, narkoba, dan berbagai rentetan peristiwa kenakalan remaja lainnya.

Gambaran seperti diatas terjadi pula di SMP Negeri 3 Sekampung. Hal ini kemungkinan terjadi karena proses belajar mengajar yang kurang maksimal atau tidak berjalan dengan baik. Perlu kami sampaikan bahwa SMP Negeri 3 sekampung berada di eks hutan register 37 yang mayoritas penduduknya adalah petani dan buruh, dan untuk dua tahun terakhir ini mulai banyak yang jadi buruh nyadap karet dan metik sawit. Kemudian di dalam penerimaan siswa baru tidak bisa melakukan seleksi karena seluruh pendaftar diterima, hal itu terjadi karena minimnya pendaftar. Banyak peristiwa pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama mengajar di SMP N 3 Sekampung, bahwa di samping hasil belajar siswa yang masih kurang maksimal, juga terlihat

bahwa siswa kurang serius dan semangat dalam mengikuti pembelajaran serta malas di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah lainnya, seperti keikutsertaan dalam upacara bendera, kegiatan kepramukaan, partisipasi dalam peringatan 17 Agustus dan masih tingginya angka pelanggaran tata tertib sekolah.

Hasil belajar yang masih rendah pada pelajaran PKn dan banyaknya angka pelanggaran tata tertib adalah merupakan indikasi akan rendahnya semangat kebangsaan dan rasa nasionalisme peserta didik. Kenyataan ini semakin diperburuk dengan sulitnya peserta didik diajak melakukan kegiatan rutin untuk sholat berjamaah di mushola, rendahnya tingkat kehadiran pada kegiatan ekstrakurikuler, minimnya sarana buku pelajaran, karena rasio minimal menurut PP No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 43 ayat 1 jumlah buku teks setiap mata pelajaran minimal persiswa, peran dan perhatian guru yang juga tidak maksimal di dalam ikut membina karakter peserta didik sehingga guru belum bisa jadi sosok yang bisa digugu dan ditiru.

Gejala semakin menurunnya sikap nasionalisme siswa semakin terlihat jelas dalam praktek keseharian, karena masih selalu ditemukan anak didik yang terlihat malas dalam mengikuti upacara bendera dan anak didik yang tidak lagi bangga menyanyikan lagu-lagu kebangsaan sehingga mereka terlihat sangat susah untuk bisa menyanyikan dengan baik lagu-lagu tersebut. Contoh ini terlihat ketika mereka menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia pada saat upacara bendera, sulitnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan setiap dilakukan razia sering pula ditemukan *hand phone* berisi gambar dan video tidak senonoh. Hal tersebut tentunya merupakan permasalahan yang perlu segera dicari jalan penyelesaiannya.

Untuk lebih jelasnya uraian diatas dapat dilihat pada tabel pelanggaran tata tertib yang merupakan hasil penelitian pendahuluan, berikut ini.

Tabel 1.1. Jumlah Kasus Pelanggaran Tata Tertib SMP N 3 Sekampung Lampung Timur dari 388 siswa TP 2010/2011 Semester 1.

NO	Kelas	Jenis Pelanggaran	Jumlah pelanggar	Prosnt %	Smtr
1	Kelas VII	1. Terlambat Hadir Upacara Bendera Hari Senin	14	3.61	Satu (I)
		2. Tidak Ikut Upacara pada hari Senin	11	2.84	
		3. Mundur pada saat upacara Bendera hari Senin	8	2.06	
		4. Tidak Upacara HUT RI 17 Agustus	10	2.58	
		5. Ribut saat upacara Bendera	9	2.32	
		6. Tidak benar menyanyikan lagu Indonesia Raya	20	5,16	
		7. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan	11	2.84	
		8. Tidak memakai seragam batik,	5	1.29	
		9. Tidak ikut solat zuhur berjamaah bagi yang muslim dan tidak berhalangan	20	5,16	
2	Kelas VIII	10. Terlambat Hadir Upacara Bendera Hari Senin	12	3.09	Satu (I)
		11. Tidak Ikut Upacara pada hari Senin	13	3.35	
		12. Mundur pada saat upacara Bendera hari Senin	10	2.06	
		13. Tidak Upacara HUT RI 17 Agustus	15	3.87	
		14. Ribut saat upacara Bendera	9	2,32	
		15. Tidak benar menyanyikan lagu Indonesia Raya	15	3.87	
		16. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan	9	2.32	
		17. Tidak memakai seragam batik,	4	1.03	
18. Tidak ikut solat zuhur berjamaah bagi yang muslim dan tidak berhalangan	25	5,93			
3	Kelas IX	19. Terlambat Hadir Upacara Bendera Hari Senin	9	2.32	Satu (I)
		20. Tidak Ikut Upacara pada hari Senin	5	1.29	
		21. Mundur pada saat upacara Bendera hari Senin	4	1.03	
		22. Tidak Upacara HUT RI 17 Agustus	16	4.12	
		23. Ribut saat upacara Bendera	7	1.80	

24. Tidak benar menyanyikan lagu Indonesia Raya	16	4,12
25. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan	10	2.58
26. Tidak memakai seragam batik,	9	2.32
27. Tidak ikut solat zuhur berjamaah bagi yang muslim dan tidak berhalangan	16	4,12
JUMLAH		

Sumber : Data Primer Guru BP SMP N 3 Sekampung, Lampung Timur tahun Tahun Pelajaran 2010- 2011.

Berdasarkan data pada Tabel 1. dapat disimpulkan bahwa dari siswa keseluruhan yang berjumlah 388 orang, masih banyak yang melakukan pelanggaran tata tertib hal ini dapat dilihat dari besaran angka pelanggaran.

Fakta yang telah dikemukakan di atas menunjukkan adanya indikasi tentang gagalnya pembangunan karakter dan sikap nasionalisme siswa, di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sekampung, Lampung Timur. Sehingga dengan demikian bisa dikatakan sikap nasionalisme peserta didik di SMP Negeri 3 Sekampung masih rendah.

Nasionalisme merupakan satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai menurun. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tidak bergerak dari tempat tersebut. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri. Dalam keseharian nasionalisme bisa tercermin dari kesediaan berkorban demi mempertahankan tempatnya tinggal dan identitas dirinya dari berbagai ancaman yang berasal dari luar. Contohnya mempertahankan miliknya dan membela kelompoknya dari ancaman pihak lain.

Menurut (Komarudin dan Azymardi Azra, 2010; 29), Nasionalisme Indonesia dalam perkembangannya ada beberapa tahap diantaranya; “bentuk nasionalisme yang merupakan kelanjutan dari semangat revolusioner pada masa perjuangan kemerdekaan dengan peran pemimpin nasional yang lebih besar. Nasionalisme ini mengandaikan adanya ancaman musuh dari luar terus menerus terhadap kemerdekaan Indonesia dan nasionalisme persatuan dan kesatuan terhadap luar negeri, nasionalisme berarti kedaulatan integritas dan identitas bangsa”

Nasionalisme merupakan sebuah paham sosial yang sangat menakjubkan dalam perjalanan sejarah umat manusia. Nasionalisme bahkan sudah menjadi sebuah ideologi yang sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara, sampai-sampai hampir tak ada satu pun ruang sosial di muka bumi yang lepas dari pengaruh ideologi ini. Saat ini, nasionalisme juga dapat dimaknai menonjolkan dirinya sebagai paham Negara atau gerakan yang populer berdasarkan pendapat warga negara, etnis, budaya, keagamaan dan ideologi dan ketaatan terhadap ikatan-ikatan bersama yang dikenal dengan istilah aturan, hukum dan tata tertib. Sehingga banyaknya pelanggaran terhadap hokum atau tata tertib berarti juga merupakan pengingkaran terhadap rasa nasionalisme.

Oleh karenanya untuk meningkatkan sikap nasionalisme peserta SMP Negeri 3 Sekampung agar bisa tercapai secara maksimal maka perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh dari berbagai komponen bangsa mulai dari keluarga, masyarakat dan juga sekolah. Pembaharuan pembelajaran di sekolah perlu dilakukan oleh semua komponen yang ada di sekolah termasuk oleh guru. Hal ini adalah sebagai upaya dalam mengatasi masalah- masalah yang ada di sekolah. Untuk itu maka perlunya menanamkan kembali sikap atau rasa nasionalisme kepada siswa agar menjadi warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter dan kepribadian bangsa yang kuat, memiliki pemahaman, penghayatan dan kesadaran yang tinggi akan hak dan

kewajiban sebagai warga negara. Mampu dan cakap melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari di segala bidang kehidupan dengan dilandasi oleh prinsip proporsionalitas, nilai-nilai spiritualitas keagamaan, nilai-nilai pluralitas sosio-budaya, nilai-nilai nasionalisme kultural, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, serta menciptakan warga negara yang mempunyai sikap nasionalisme Indonesia.

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, sehingga siswa atau peserta didik SMP Negeri 3 Sekampung menjadi warganegara yang memiliki karakter dan kepribadian, sikap nasionalisme dan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai factor diantaranya; proses pembelajaran, pembelajaran PKn, guru, pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) lingkungan sosial yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan sarana prasana yang ada di sekolah.

Menurut Mulyasa (2003 ; 101): “Proses pembelajaran dikatakan efektif apabila seluruh siswa sekurang-kurangnya 75 % terlibat secara aktif, baik mental, fisik, maupun sosialnya. Sedangkan dari segi hasil, kualitas pembelajaran dikatakan baik apabila terjadi perubahan perilaku yang positif dari siswa antara lain; kemampuan menggali dan mengolah informasi, mengambil keputusan, menghubungkan variable”.

Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sekampung proses pembelajaran juga masih dirasa belum optimal, hal ini terlihat dari peserta didik atau siswa yang pada saat proses belajar mengajar masih sangat sulit untuk diajak aktif.

Kenyataan tersebut juga terlihat pada penguasaan materi khususnya materi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang masih belum seperti yang diharapkan dengan kata lain masih rendah. Dikatakan rendah karena walaupun telah diadakan remidi khususnya pada kelas VIII tentang Standar Kopetensi (1) “menampilkan

perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila”, Kompetensi Dasar (3) “menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”, dan kelas IX tentang Standar Kompetensi (1) “menampilkan partisipasi dalam usaha pembelaan Negara”, Kompetensi Dasar (3) “menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan Negara”, tetap saja masih ada lebih dari 30 % yang mendapat nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

Padahal Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang sangat strategis didalam membentuk kepribadian dan karakter bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban asasinya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945. PKn bukan semata-mata hanya mengajarkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar (UUD). Tapi lebih jauh PKn mengkaji perilaku warga negara dalam hubungannya dengan warga negara lain dan alam sekitarnya. Objek studi PKn adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan dan negara. Menurut M. Numan Somantri (2001: 276) termasuk dalam objek studi civics ialah: “tingkah laku, tipe pertumbuhan pikir, potensi yang ada dalam setiap diri warga negara, hak dan kewajiban, cita-cita dan aspirasi, kesadaran (patriotisme, nasionalisme, pengertian internasional, moral Pancasila), usaha atau kegiatan dan partisipasi serta tanggungjawab”.

Dengan demikian penilaian terhadap kompetensi yang dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran PKn di sekolah tidak bisa hanya terbatas pada aspek pengetahuan siswa, tetapi juga mencakup sikap dan keterampilan siswa. Hal ini mengingat siswa yang saat ini mengikuti pembelajaran PKn di sekolah nantinya akan menjadi warga negara yang menjadi penerus bangsa. Apa yang akan terjadi

kalau generasi penerus bangsa nantinya hanya mempunyai pengetahuan tetapi tidak mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki tiga ciri khas, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewarganegaraan. Ketiga hal tersebut merupakan bekal bagi peserta didik untuk meningkatkan kecerdasan multidimensional yang memadai untuk menjadi warga negara yang baik. Untuk mewujudkan ketiga hal tersebut, maka materi pelajaran PKn diorganisasi secara interdisipliner dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, hukum, tatanegara, psikologi, dan berbagai kajian lainnya yang bersal dari kemasyarakatan, nilai-nilai budi pekerti, dan hak asasi manusia dengan penekanan kepada hubungan antara warga negara dan warga negara, warga negara dan pemerintahan negara, serta warganegara dan warga dunia.

Keberhasilan dalam proses belajar mengajar juga tidak terlepas dari peran serta guru. Guru sebagai sosok yang menjadi unsur yang sangat penting, apalagi bagi sekolah yang masih menerapkan konsep pembelajaran berpusat pada guru (*teacher centered*) artinya guru sebagai pusat sumber belajar. Hal ini juga terjadi di sekolah kami yang mayoritas guru masih sering mendominasi kelas, peserta didik hanya menerima saja apa-apa yang disampaikan oleh guru, begitupun aktivitas siswa untuk menyampaikan pendapat atau gagasan sangat kurang, siswa terlihat pasif dalam belajar, sehingga pembelajaran yang dialami oleh siswa kurang memberikan makna bagi siswa dan terkesan tidak demokratis, sebab kurang melibatkan siswa dalam pembelajaran.

Kegiatan Jum'at bersih dan solat zuhur berjamaah peran guru juga sangat tidak memadai, karena setiap kegiatan Ju'mat bersih hanya guru pembina Osis yang terlihat bersama peserta didik untuk mengawasi dan pada saat solat Zuhur berjamaah hanya satu atau dua guru yang ikut solat, termasuk imam dan hanya guru BP yang

selalu peduli terhadap peserta didik yang tidak melaksanakan kewajibannya. Sehingga sosok guru di sekolah kami belum dapat dijadikan teladan atau panutan atau belum menerapkan konsep "ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani," seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar dewantara.

Sedangkan *civic knowledge* merupakan bentuk pengetahuan kewarganegaraan sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu dari lima tradisi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yakni *citizenship transmission*, saat ini sudah berkembang menjadi tiga aspek pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship education*), yakni aspek akademis, aspek kurikuler, dan aspek sosial budaya. Secara akademis pendidikan kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai suatu bidang kajian yang memusatkan telaahan pada seluruh dimensi psikologis dan sosial budaya kewarganegaraan individu, dengan menggunakan ilmu politik, ilmu pendidikan sebagai landasan kajiannya atau penemuan intinya yang diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan, dan mempunyai implikasi kebersamaan terhadap instrumentasi dan praktis pendidikan setiap warga negara negara dalam konteks sistem pendidikan nasional (Wiranaputra, 2004) dalam depdiknas (2008: 7-8).

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab. PKn mengembangkan daya nalar (state of mind) bagi para peserta didik. Pembangunan karakter bangsa merupakan proses pengembangan warga negara yang cerdas dan berdaya nalar tinggi. PKn memusatkan perhatiannya pada pengembangan kecerdasan (*civic intelligence*), tanggung jawab (*civic responsibility*) dan partisipasi (*civic participation*) warga negara sebagai landasan pengembangan nilai dan perilaku demokrasi.

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) berkaitan dengan kandungan apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara. Sedangkan *civic knowledge* yang

dimaksud adalah kemampuan yang dimiliki individu warga negara dalam aspek pengetahuan tentang ilmu kewarganegaraan. Baik di dalam *National Standards* dan *Civic Framework for the 1998 National Assessment of Educational Progress* (NAEP) (Branson, 1999, 9). Komponen pengetahuan itu diwujudkan dalam bentuk lima pertanyaan penting yang terus menerus diajukan yaitu: 1) Apa kehidupan kewarganegaraan, politik dan pemerintahan ?; 2) Apa fondasi-fondasi sistem politik ?; 3) Bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh konstitusi mengejawantahkan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi ?; 4) Bagaimana hubungan antara suatu negara dengan negara-negara lain di dunia ?; 5) Apa peran warga negara dalam demokrasi?.

Penuangan materi pengetahuan kewarganegaraan dalam bentuk pertanyaan dimaksudkan bahwa prosesnya merupakan sesuatu yang disengaja dan prosesnya tidak pernah berakhir. Hal ini memberikan kesempatan kepada setiap individu dalam hal ini siswa untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic knowledge*) siswa tidak terlepas dari pelajaran PKn, sehingga Rendahnya penguasaan pengetahuan kewarganegaraan siswa SMP Negeri 3 Sekampung dapat dilihat dari hasil belajar yang dilakukan selama ini yang mencapai rata-rata masih dibawah KKM, hal ini juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor; antara lain siswa belajar hanya menggunakan buku LKS, tidak ada buku sumber belajar yang lain yang dimiliki, kurangnya perhatian peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung, peserta didik cenderung sibuk ngobrol sendiri-sendiri, tidak memanfaatkan kesempatan bertanya pada saat diberi kesempatan bertanya, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan siswa terhadap *civic knowledge* masih rendah.

Selain faktor *civic knowledge* peserta didik ada faktor lain yang menyebabkan tumbuhnya sikap nasionalisme yaitu faktor internal dan eksternal dari siswa. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik seperti konsep diri dan *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan). Sedangkan faktor eksternal

adalah faktor yang terdapat di luar siswa, seperti; pembelajaran di sekolah, lingkungan sosial, dan lain-lain.

Lingkungan sosial pertama yang memberikan pengaruh sangat besar bagi tumbuh kembangnya remaja adalah keluarga. Dengan kata lain, secara ideal perkembangan remaja akan optimal apabila mereka bersama keluarganya. Tentu saja keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang harmonis, sehingga remaja memperoleh berbagai jenis kebutuhan, seperti kebutuhan fisik-organik, sosial maupun psiko-sosial. Keluarga dipandang sebagai lingkungan dini yang dibangun oleh orang tua dan orang-orang terdekat. Dalam bentuknya keluarga selalu memiliki kekhasan. Setiap keluarga selalu berbeda dengan keluarga lainnya. Ia dinamis dan memiliki sejarah “perjuangan, nilai-nilai, kebiasaan” yang turun temurun mempengaruhi secara akulturatif (tidak tersadari). Sebagaimana ahli menyebutnya bahwa pengaruh keluarga amat besar dalam pembentukan pondasi kepribadian anak. Keluarga yang gagal membentuk kepribadian anak biasanya adalah keluarga yang penuh konflik, tidak bahagia, tidak solid antara nilai dan praktek, serta tidak kuat terhadap nilai-nilai baru yang rusak.

Perubahan sosial, ekonomi dan budaya dewasa ini telah banyak memberikan hasil yang menggembirakan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian pada waktu bersamaan, perubahan-perubahan tersebut membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi keluarga. Misalnya Adanya gejala perubahan cara hidup dan pola hubungan dalam keluarga karena berpisahnya suami/ibu dengan anak dalam waktu yang lama setiap harinya. Kondisi yang demikian ini menyebabkan komunikasi dan interaksi antara sesama anggota keluarga menjadi kurang intens. Hubungan kekeluargaan yang semula kuat dan erat, cenderung longgar dan rapuh . Ambisi karier dan materi yang tidak terkendali, telah mengganggu hubungan interpersonal dalam keluarga.

Sehingga dalam kenyataan lingkungan khususnya keluarga sebagai wali murid terlihat masih kurang peduli terhadap perkembangan putra putrinya di sekolah. Hal ini juga terlihat ketika peserta didik di SMP Negeri 3 Sekampung melakukan pelanggaran tata tertib dari panggilan terhadap orang tua yang anaknya memiliki masalah oleh BP dari 20 panggilan hanya 12 orang tua wali yang bisa hadir.

Lingkungan social kedua adalah lingkungan masyarakat, atau lingkungan pergaulan anak. Biasanya adalah teman-teman sebaya di lingkungan terdekat, termasuk didalamnya adalah teman belajar di sekolah. Kesenjangan antara norma, ukuran, patokan dalam keluarga dengan lingkungannya perlu diperkecil agar tidak timbul keadaan timpang atau serba tidak menentu, suatu kondisi yang memudahkan munculnya perilaku tanpa kendali, yakni penyimpangan dari berbagai aturan yang ada.

Begitu juga di lingkungan sekolah, susana belajar yang kondusif biasaya tercermin pada sekolah yang mempunyai budaya sekolah yang baik. Keunggulan sebuah sekolah adalah memiliki budaya sekolah (*school culture*) yang kokoh, dan tetap eksis. Perpaduan semua unsur baik peserta didik, guru dan orang tua yang bekerja sama akan menciptakan komunitas yang lebih baik. Namun kalau kita lihat yang terjadi di SMP Negeri 3 Sekampung berdasarkan kondisi yang telah kami gambarkan diatas terlihat tidak kondusif bagi tumbuh kembangnya nilai-nilai karakter, kepribadian dan sikap nasionalisme Indonesia siswa.

Oleh karenanya untuk mengatasi masalah tersebut harus dilakukan kajian tentang factor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya sikap nasionalisme peserta didik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sekampung, Lampung Timur, baik factor intern maupun factor ekstern. Factor intern adalah factor yang berasal dari dalam diri peserta didik yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*),

sedangkan factor ekstern adalah factor yang berasal dari luar siswa antara lain; pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, dan lingkungan social.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah ini dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Sikap nasionalisme siswa sebagai bangsa Indonesia masih rendah
2. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) masih belum maksimal dan optimal.
3. Persepsi siswa tentang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) masih belum sikap yang positif.
4. Guru belum mampu menjadi sosok yang bisa menerapkan konsep "ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso, tut wuri handayani" kepada siswa.
5. Guru belum mempunyai kesadaran yang tinggi untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan (nasionalisme dan patriotisme) kepada siswa.
6. Tingkat pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) siswa masih rendah.
7. Lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat belum mendukung secara maksimal untuk menumbuhkan sikap nasionalisme siswa.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang telah teridentifikasi, penulis membuat batasan masalah yang akan menjadi fokus penelitian agar sesuai dengan tujuan penelitian ;

1. Sikap nasionalisme siswa atau peserta didik.
2. Persepsi siswa tentang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

3. Lingkungan sosial siswa, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.
4. Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) siswa.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh persepsi siswa tentang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terhadap sikap nasionalisme peserta siswa SMP N 3 Sekampung Lampung Timur.
2. Apakah terdapat pengaruh lingkungan sosial terhadap sikap nasionalisme siswa SMP N 3 Sekampung Lampung Timur.
3. Apakah terdapat pengaruh *Civic Knowledge* terhadap sikap nasionalisme siswa SMP N 3 Sekampung Lampung Timur.
4. Apakah terdapat pengaruh persepsi siswa tentang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, terhadap *civic knowledge* siswa.
5. Apakah terdapat pengaruh lingkungan social terhadap pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) siswa.
6. Apakah terdapat pengaruh persepsi siswa tentang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, lingkungan social dan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) terhadap sikap nasionalisme siswa SMP N 3 Sekampung.
7. Apakah terdapat pengaruh siswa didik tentang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, melalui pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) terhadap sikap nasionalisme peserta didik SMP N 3 Sekampung Lampung Timur.

8. Apakah terdapat pengaruh lingkungan social melalui pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) terhadap sikap nasionalisme siswa SMP N 3 Sekampung Lampung Timur.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang:

1. Pengaruh persepsi siswa tentang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terhadap sikap nasionalisme siswa SMP N 3 Sekampung Lampung Timur.
2. Pengaruh *Civic Knowledge* terhadap sikap nasionalisme siswa SMP N 3 Sekampung Lampung Timur.
3. Pengaruh lingkungan sosial terhadap sikap nasionalisme siswa SMP N 3 Sekampung Lampung Timur.
4. Pengaruh persepsi siswa tentang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, terhadap pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) siswa SMP Negeri 3 Sekampung Lampung Timur.
5. Pengaruh lingkungan social terhadap pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) siswa SMP N 3 Sekampung Lampung Timur.
6. Pengaruh persepsi siswa tentang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn), lingkungan social dan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) terhadap sikap nasionalisme siswa SMP N 3 Sekampung Lampung Timur.
7. Pengaruh persepsi siswa tentang pembelajaran PKn, melalui *civic knowledge* terhadap sikap siswa SMP N 3 Sekampung Lampung Timur.

8. Pengaruh lingkungan social melalui pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) terhadap sikap nasionalisme siswa SMP N 3 Sekampung Lampung Timur.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut.

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan konsep pendidikan ilmu pengetahuan sosial, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta memperluas kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn), yang dapat menjadi rujukan dalam peningkatan kualitas pembelajaran di lapangan secara langsung.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini mempunyai kegunaan:

1. Bagi peneliti, yaitu dapat melengkapi atau memperluas khasanah teori yang sudah diperoleh melalui penelitian lain sebelumnya, memberi peluang untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal yang sama dengan menggunakan teori-teori lainnya yang belum digunakan dalam penelitian ini serta dapat membantu penulis memperoleh wawasan mengenai pentingnya pembentukan sikap nasionalism. Selain itu, tulisan ini dapat melatih penulis dalam mengemukakan pikiran dengan cara yang lebih baik. Gagasan ini juga dapat menjadi inspirasi kepada keluarga untuk memberikan pendidikan karakter sejak dini.
2. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan berwarganegara (*civic*

skills) dan pembentukan karakter bangsa (*civic disposition*) khususnya sikap bangsa sebagai bangsa Indonesia.

3. Bagi guru, khususnya mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan untuk membangkitkan sikap nasionalisme kepada peserta didik di sekolah.
4. Memberikan masukan kepada institusi sekolah sehingga bisa mengembangkan kurikulum yang berbasis sekolah atau KTSP, dan dapat membantu bagaimana cara-cara mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa dan sikap nasionalisme.
5. Bagi program studi dapat dipakai sebagai sumbangan pemikiran untuk lebih meningkatkan proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, khususnya Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu Pendidikan IPS dengan wilayah kajian pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, karena pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu dari lima tradisi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yakni *civic ideals and practices*, yaitu dalam rangka membentuk warganegara yang baik, cerdas (*good and smart citizen*), terampil dan punya keberibadian serta karakter yang kuat.

Konsep-konsep Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang termuat di dalam lima tradisi *social studies* yaitu sebagai berikut :

1. IPS sebagai Tranmisi Kewarganegaraan (*social studies as citizenship transmission*),
2. IPS sebagai Ilmu-Ilmu Sosial (*social studies as social sciences*),
3. IPS sebagai Penelitian Mendalam (*social studies as reflektive inquiry*),
4. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai Kritik Kehidupan Sosial (*social studies as social criticism*) dan
5. IPS sebagai Pengembangan Pribadi Individu (*social studies as personal development of the individual*).

Pembelajaran Pendidikan IPS diharapkan dapat berkembang pada diri siswa, khususnya kemampuan agar siswa mampu hidup di tengah-tengah masyarakat. Seperti dikemukakan Fenton (1967:1) bahwa, tujuan studi social adalah “*prepare children to be good citizen : social studies teach children how to think and : social studies pass on the cultural heritage*”. (Pembelajaran Pendidikan IPS mendidik anak menjadi warga negara yang bak, mampi berfikir, dan mewariskan kebudayaan kepada generasi penerusnya). Sedangkan menurut Jarolimek (1977:3-4) bahwa : *social studies education has as its particular mission the task of helping youg people develop competencies that enable them to deal with , and to some extent manage , the physical and social forces of in which they live. Such competencies make it possible for pupil to shape their lives on harmony with those forces.*

Tujuan ini akan dicapai dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. PKn adalah salah satu bentuk pendidikan politik yang tujuannya adalah membentuk warga negara yang baik yaitu warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak – hak dan kewajibannya sebagai individu dan warga negara.

Penelitian ini terfokus pada pada tradisi (*social studies as citizenship transmission*) Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai Tranmisi Kewarganegaraan.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah salah satu bentuk pendidikan politik yang tujuannya adalah membentuk warga negara yang baik yaitu warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu dan warga negara yang berkarakter.

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah sikap nasionalisme Indonesia, pendidikan kewarganegaraan (PKn), lingkungan social (lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat) dan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) peserta didik Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sekampung, Lampung Timur.

3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 3 Sekampung Lampung Timur.

4. Tempat dan Waktu Penelitian

Penetapan tempat/lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diperoleh. Oleh karena itu, maka lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, lokasi yang peneliti pilih adalah SMP Negeri 3 Sekampung yang dilakukan pada Tahun Pelajaran 2011/2012.

Pemilihan lokasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sekampung karena peneliti merupakan guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah tersebut, pelaksanaan pembelajaran kontekstual dilaksanakan pada

semua mata pelajaran. Kurikulum yang digunakanpun telah disesuaikan dengan kurikulum yang saat ini berlaku yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

